

MENGURAI KONFLIK KOMUNAL INTERNAL NEGERI-NEGERI ISLAM DI JAZIRAH LEIHITU, MALUKU TENGAH

M. Ridwan Tunny¹ dan Subair²
Fakultas Uswah IAIN Ambon
*) ridwantunny60@gmail.com

ABSTRACT

This article is part of a field study to describe and parse the root of internal communal conflicts in the Muslim community of jazirah Leihitu, Central Maluku. For decades, the conflict between Muslim countries is difficult solved completely. The study was started with a vision that emerged from the dream that the resolution of communal conflicts between Islamic countries in Maluku can happen completely and peace can be realized in a sustainable manner if the actors of conflict has always felt as a victim have been turned into survivors. In other words, the victim has to be part of the solution. The first step to realizing this vision is to unravel the roots of the conflicts that occur. The study was conducted using qualitative methods to approach the Sociology of Religion. Data retrieval research carried out from June to September 2015. The research data consists of historical data and actual conditions related to the communal conflict in the research sites. Historical data include recording the subject and the experience of events that have been published in both official documents and personal property actors in the field. Actual data includes the reality and the escalation of the conflict, the patterns and sociological-philosophical meaning will be revealed through interviews and observations participate. The study shows that various internal conflicts Muslims in the peninsula Leihitu, it can be concluded that komunall violence is something that is implicated in the domestic society of these kings. Some roots of the conflict that has been identified is kenalakan adolescents and the influence of liquor, the completion of which is not comprehensive and complete, problem history and customs, and legal settlement have not touched base value.

Keywords: *communal conflicts, internal conflicts, Jazirah Leihitu*

A. PENDAHULUAN

Leihitu merupakan salah kecamatan atau disebut juga jazirah, yang berada di sebelah utara Pulau Ambon. Jazirah Leitimur yang lebih kecil ada di sebelah selatan. Kedua jazirah tersebut disambungkan oleh daratan sempit bernama Passo, sehingga membentuk satu pulau yang dikenal sebagai Pulau Ambon. Terdapat 11

Negeri Mamala, Negeri Morella, Negeri Negeri Lima, Negeri Seith, Negeri Ureng dan Negeri Wakal. Negeri-negeri tersebut sebagian besar ada di pesisir pantai karena dataran landainya lebih banyak di pinggir pulau, sedangkan di tengah pulau karena berbukit dan hutan jadi tidak banyak dihuni.

Berdasarkan laporan bulanan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia pada Januari 2013, Jazirah Leihitu merupakan wilayah yang

teridentifikasi memiliki daerah rawan konflik terbanyak di Maluku. Kasus-kasus konflik kekerasan yang mengemuka adalah bentrok antardesa/kampung yang selalu terulang. Sepanjang Januari 2012 - Januari 2013 tercatat 10 insiden yang mengakibatkan 12 cedera dan satu bangunan rusak. Konflik kekerasan itu kebanyakan dipicu dendam lama dan masalah antarkampung/desa yang sudah lama terjadi berupa penganiayaan, perkelahian bahkan sampai berujung bentrokan.¹

Selama puluhan tahun, konflik antara negeri-negeri Islam/muslim sulit diselesaikan secara tuntas. Selalu ada residu yang mengendap, karena faktor-faktor laten tidak terselesaikan secara memadai. Pendekatan penyelesaian konflik pun belum menyentuh cara pandang kebudayaan masyarakat tersebut. Studi ini mencoba menggunakan pendekatan nilai-nilai kearifan lokal dan Islam. Pendekatan ini digunakan untuk memberi bobot baru ke dalam pendekatan persuasif dan dialogis seperti lazimnya digunakan.

Pilihan pada pendekatan kebudayaan karena karakteristik konflik yang dihadapi menghadapkan komunitas berbudaya dengan tipikal keagamaan tertentu (sama-sama komunitas Islam). Dengan demikian konsep nilai-nilai kearifan lokal dan Islam yang diterapkan mencoba memanfaatkan pola-pola

pembinaan agama untuk memediasi konflik dan membangun kesepakatan damai.

Studi ini dimulai dengan sebuah visi bahwa resolusi konflik komunal antarnegeri Islam di Maluku dapat terjadi secara tuntas serta perdamaian dapat terwujud secara berkelanjutan apabila para aktor-aktor konflik yang selama ini selalu merasa sebagai korban (*victims*) telah berubah menjadi *survivors*. Dengan kata lain korban telah menjadi bagian dari solusi (*part of solutions*). Langkah pertama untuk mewujudkan visi tersebut adalah membuat “peta” untuk dapat menjadi petunjuk jalan. Strategi intervensi untuk resolusi konflik komunal Jazirah Leihitu, pada dasarnya dikembangkan dan dimodifikasi dari kerangka *making peace* yang dibuat oleh Adam C. Curle tahun 1971.² Ada dua syarat utama terwujudnya damai menurut peta damai itu yaitu pertama, adanya kesadaran kritis yang tinggi dari seluruh pihak yang berkonflik. Kedua, adanya kapasitas/kekuatan yang berimbang dari pihak-pihak yang berkonflik, sehingga tidak terjadi penindasan dari kelompok yang lebih dominan. Kedua syarat ini berkembang dalam suatu proses yang bertahap dan bertingkat-tingkat.

Langkah berikutnya dari proses intervensi adalah mencari “Bahasa” yang dapat dimengerti oleh kelompok yang sedang berkonflik. Masyarakat Maluku sesungguhnya memiliki bahasa yang sama untuk melakukan

¹ Lihat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2013. *Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) Laporan Bulanan Januari 2013*, Edisi 2 Januari, 2013.

²Lihat John Paul Lederach. *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. (USA: United States Institute of Peace Press, 1998).

rekonsiliasi yaitu *Bakubae*, yang artinya adalah rekonsiliasi yang bertumpu kepada korban konflik. *Bakubae* harus dipahami dalam menganalisis resolusi konflik dan anarkisme agama karena agama pada dasarnya mengabarkan adanya perdamaian dan cinta kasih kepada umat lain yang mempunyai keyakinan berbeda, apalagi kepada sesama umat. Adanya konflik dalam komunitas yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dan budaya agama diduga telah terjadi distorsi dalam ajaran agama tersebut.³

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan pendekatan Sosiologi Agama. Pengambilan data penelitian dilakukan pada bulan Juni sampai September 2015. Secara umum, lokasi penelitian adalah desa-desa atau negeri di Jazirah Leihitu, yang secara administrasi berada dalam dua kecamatan yakni Kecamatan Leihitu dan Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah. Secara purposif dengan pertimbangan utama eskalasi konflik yang terbesar, terlama dan berpotensi terus terjadi, dipilih lokasi-lokasi yang akan dianalisis secara mendalam yakni negeri Negeri Ureng, Negeri Mamala, Negeri Morela, Negeri Seith dan Negeri Lima. Data penelitian terdiri dari data sejarah dan kondisi aktual terkait konflik komunal di lokasi penelitian. Data sejarah meliputi pengalaman subjek dan

rekaman kejadian yang telah terpublikasi pada dokumen baik yang resmi maupun milik pribadi aktor di lapangan. Data aktual meliputi realitas dan eskalasi konflik, pola-polanya serta makna filosofis-sosiologis yang akan diungkap melalui wawancara mendalam dan pengamatan berperanserta.

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik pengamatan berperan serta (*participant-observation*) dan wawancara mendalam secara langsung pada tineliti. Untuk mendukung validitas data yang dikumpulkan, dilakukan pula studi pustaka, terutama terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu serta dokumen-dokumen terkait lainnya. Pengumpulan data juga dilakukan melalui pendekatan media. Dalam penelitian ini, database konflik komunal dibangun dengan menggunakan pendekatan media (*media approach*). Pendekatan ini sengaja dipilih karena kombinasi dari tiga alasan berikut: kredibilitas, ketersediaan, dan efisiensi. Bagaimanapun, setidaknya terdapat dua sumber data alternatif.

Sumber data primer penelitian adalah pemerintah setempat, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama pada masing-masing wilayah yang berkonflik. Unit analisis dalam penelitian ini adalah aktor dan kelembagaan negeri adat pada seluruh lokasi penelitian. Aktor selanjutnya dalam penelitian ini disebut informan diperoleh melalui cara "*snowballing sample*" dan "*key*

³Rizal S. Panggabean. *Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)*, (Jakarta: Asia Foundation, 2009), h. 7.

person”.⁴ Untuk mendapatkan sumber informasi atau informan yang tepat akan dilakukan tiga tahap, yakni (a) pemilihan informan awal yang terkait dengan fokus penelitian, (b) pemilihan informan lanjutan guna memperluas deskripsi informasi dan melacak variasi informasi yang mungkin ada, dan (c) menghentikan pemilihan informan lanjutan bilamana dianggap sudah tidak ditemukan lagi variasi informasi. Aktor dipilih secara purposif mewakili komunitas yang berkonflik. Lembaga adat-sosial merupakan representasi kelembagaan yang diduga berkontribusi pada konflik, baik sebagai pemicu maupun sebagai media resolusi konflik.

C. Deskripsi Konflik

1. Konflik Negeri Lima – Negeri Seith

Barangkali konflik Negeri Lima dan Negeri Seith adalah salah satu konflik terbaru yang terjadi antara negeri-negeri Islam di Jazirah Leihitu. Sampai saat ini, kedua negeri ini masih belum berdamai meskipun tidak lagi terjadi konflik terbuka sebagaimana terjadi pada tahun 2014.

Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat perbedaan dari informan di dua lokasi berbeda tentang siapa yang memulai dan bagaimana kronologis konflik. Menurut informan dari Negeri Lima, konflik yang terjadi pasca lebaran Idul Fitri tahun 2014 itu dimulai

oleh provokasi pihak Negeri Seith. Hal tersebut misalnya digambarkan oleh seorang informan pada kutipan wawancara berikut ini. Informan penelitian, YH menceritakan kejadian tersebut sebagai berikut.

“... Jadi proses awal kejadian negeri Lima dan Negeri Seith itu saya bisa mengatakan bahwa pemicu pertama itu pemuda Seith. Karena kenapa, pada saat lebaran 2014 lalu, ada anak-anak Seith mereka pukul salah satu warga Negeri Lima, lalu ada teman-temannya lihat. Katanya anak-anak yang pukul itu mereka menuju ke Dusun Negeri Lima yaitu Waekiku. Sesudah itu mereka balik langsung anak-anak Negeri Lima tahan mereka. Pada saat itu mereka memang dipukul tetapi tidak terlalu parah, mungkin cuma tergores sedikit di bagian tubuhnya. Tapi pada saat itu sudah dibuat aman secara baik-baik. Pelaku dan korban sudah sama-sama ada di Pejabat. Ternyata malam itu warga Seith datang ke Negeri Lima sekitar 60 orang, jadi mereka menuntut supaya pelaku Negeri Lima harus ditahan. Pada saat itu warga Negeri Lima tidak menyerahkan pelaku tetapi akan menyerahkannya ke Polres (Maluku Tengah, pen.). Jadi, di situ pada malam itu juga, kalau misalkan warga Negeri Lima punya niat betul-betul, tidak menutup kemungkinan warga Seith yang sekitar 60 orang itu terbunuh karena mereka melakukan (perbuatan) brutal dalam Negeri Lima. Tetapi dengan rasa kemanusiaan maka mereka diberi pandangan dengan baik lalu dipulangkan secara baik-baik. Padahal beberapa hari kemudian warga Seith melakukan palang jalan agar masyarakat Negeri Lima tidak bisa lewat. Lalu mereka membuat strategi penyerangan tanpa diketahui oleh masyarakat Negeri Lima. Kebetulan pada saat itu ada mobil penumpang dari Asilulu maupun Larike membawa informasi bahwa masyarakat Seith sudah melakukan penyerangan dan rumah-rumah di perbatasan sudah terbakar. Lalu

⁴Burhan Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan. Publik, dan Ilmu Sosial* (Jakarta: Kencana Prenama Media Group, 2007), h. 76. Lihat juga Deddy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001).

masyarakat Negeri Lima panik sehingga tidak membawa apa-apa dan mereka lari rata dengan tangan kosong. Yang bawa alat tajam itu Cuma orang-orang yang masuk hutan tetapi pada saat itu ketika lari ke lokasi kejadian dengan sebuah harapan itu cuma sekedar mengusir tetapi ternyata rumah penduduk sudah rata dengan tanah. Dengan demikian emosional masyarakat pada saat itu secara spontan langsung membakar rumah-rumah yang ada pada dusun Negeri Seith yang namanya Nahait. Korban pada saat itu 3 orang meninggal dari Negeri Lima akibat terkena tembakan. Puluhan pohon dikikis (dikuliti) sampai mati”.⁵

Wawancara dengan beberapa informan tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat di Negeri Lima menggambarkan betapa konflik antar kedua negeri begitu membekas dalam ingatan setiap orang di Negeri Lima. Semuanya meyakini bahwa pemicu konflik pertama kali bukan dari pihak Negeri Lima melainkan mereka hanya sekedar membela diri dan mempertahankan kehormatan diri belaka.

Keyakinan yang sama, tetapi dari sisi yang berlawanan, juga diyakini oleh tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat Negeri Seith. Meskipun penjelasan tentang kronologi bentrok relatif sama, tetapi informan dari Negeri Seith meyakini bahwa pemicu konflik pertama kali ialah pihak Negeri Lima. Berikut kutipan salah satu hasil wawancara dengan tokoh adat Negeri Seith.

“Pada Tanggal 31 Juli 2014 kejadian konflik Seith, Negeri Lima pada saat Lebaran Idul Fitri. Pada saat Lebaran Idul

Fitri di Seith pada Tanggal 28 Agustus 2014 pada waktu sore jam 05.00 pada saat selesai merayakan (Hadarat). Pas waktu itu anak remaja atau pemuda laki-laki yang bernama Rais Talla dan Kadafi Talla pergi *baronda* (jalan-jalan) memakai dua motor. Mereka ke Ureng sekalian ke Asilulu. Dalam perjalanan pulang, di kompleks matahari turun dalam kampung Negeri Lima mereka ditahan oleh sekumpulan pemuda Negeri Lima yang sedang minum-minum miras. Pemuda tersebut memukuli 4 orang pemuda Seith sampai babak belur. Kejadian tersebut terdengar sampai ke Seith dan membuat masyarakat Seith panik karena 1 dari 4 pemuda yang dipukuli mengalami koma”.⁶

Kutipan wawancara informan penelitian di atas berbeda dengan kutipan wawancara sebelumnya dengan tokoh adat Negeri Lima yang menyebutkan bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh pemuda Negeri Lima tidak berdampak fatal, hanya mengakibatkan luka gores. Sementara pengakuan informan penelitian dari Seith menyebutkan bahwa bukan hanya 1 orang yang dianiaya tetapi 4 orang dan salah satunya bahkan mengalami koma dan harus dirawat di rumah sakit.

Lebih lanjut, informan yang sama menjelaskan.

“Akibat kejadian penganiayaan pemuda Negeri Lima terhadap pemuda Seith itu, pihak Seith yang terdiri dari orang tua-tua adat, kepala soa Nukuitu, Soa Hautuna, Soa Lewas, Soa Lain, Bapak Raja, Sekretaris Negeri, Kepala Pemuda Soa Nuitu, Soa Hautuna, Soa Lewas, Soa Lain berkumpul untuk mencari solusi

⁵YH, 49 Tahun, tokoh Adat Negeri Lima, wawancara di Negeri Lima, 20 Agustus 2015.

⁶SH, tokoh adat Negeri Seith, Wawancara di Seith, 31 Juli 2015.

bagaimana untuk kejadian itu terselesaikan. Waktu terus berjalan masyarakat Seith belum sempat mendapat solusi bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut karena itu semua harapan dari masyarakat Seith karena masyarakat Seith berpikir Seith dan Negeri Lima semua basudara, semua orang Islam. Padahal satu orang negeri Lima yang tinggal di Seith memberi tahu lewat HP bahwa Seith mau menyerang Negeri Lima. Padahal masyarakat Seith berkumpul untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah ini. Dan itu pun masyarakat Negeri Lima menerima kabar dari salah satu orang Negeri Lima yang tinggal di Seith bahwa masyarakat Seith mau menyerang Negeri Lima. Salah paham itu terjadi pas tanggal 31 Juli 2014. Konflik besar-besaran antara masyarakat Seith dan Negeri Lima. Akibatnya masyarakat Negeri Lima membakar rumah-rumah petuanan Seith hingga hangus terbakar. Masyarakat Seith pun membalas dengan membakar rumah-rumah di petuanan Negeri Lima. Penyerangan tersebut berjalan hingga akhirnya masyarakat Seith meninggal 1 orang dan sebagian besar luka-luka”.⁷

Penjelasan dari informan di atas juga berbeda dengan penjelasan dari informan tokoh adat yang telah dikutip sebelumnya. Informan meyakini bahwa warga Negeri Seith tidak melakukan penyerangan pertama kali melainkan mereka hanya melakukan serangan balasan setelah sebelumnya petuanan Negeri Seith diserang dan dibakar oleh warga Negeri Lima.

Sebagai opini pihak ketiga, peneliti merasa perlu menampilkan opini media massa yang dimuat sebagai pemberitaan koran lokal

atas konflik komunal di Negeri Lima dengan Negeri Seith. Peneliti menemukan banyak pemberitaan terkait konflik antara Negeri Lima dan Negeri Seith, baik pada media massa lokal maupun nasional. Tampaknya trauma konflik komunal yang bernuansa SARA di Kepulauan Ambon sebelumnya masih tersimpan dalam benak masyarakat Maluku sehingga setiap konflik yang terjadi menjadi pusat perhatian, apalagi jika sampai menimbulkan korban jiwa.

Konflik antara Negeri Lima dan Negeri Seith terjadi dalam dua periode. Periode pertama terjadi pada tanggal 31 Juli 2014, sebagaimana digambarkan sebuah koran lokal berikut ini.

“Warga Desa Seith dan warga Negeri Lima, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, Maluku Tengah kembali terlibat bentrok dan saling serang pada Kamis (31/7) petang, mengakibatkan lima orang meninggal dunia. Pantauan Antara Jumat dini hari, peristiwa bentrokan dan saling serang berlangsung di dusun Nahai yang merupakan perbatasan antarkedua desa bertetangga itu sekitar pukul 16.00 WIT. Aksi penyerangan ke dusun Nahai dilakukan warga Seith karena tidak terima atas pembacokan hingga meninggal seorang warganya yakni Benjamin Maju (30) di dusun tersebut. Benjamin Maju tewas karena mengalami pendarahan akibat luka bacokan di bagian kepala dan punggung kiri. Korban sempat dilarikan ke RSUD Haulussy, Kudamati Ambon, tetapi nyawanya tidak tertolong akibat luka yang diderita tergolong parah. Kematian korban menyulut emosi warga Seith lainnya yang akhirnya melakukan penyerangan ke Dusun Nahai yang dihuni warga Negeri Lima. Aksi penyerangan tersebut mengakibatkan seorang warga Seith lainnya yakni Usman Moni (38)

⁷ *Ibid.*

terluka akibat terkena sabetan parang pada bagian leher. Sedangkan tiga warga Negeri Lima yang meninggal yakni Duba Selli (60) dan Kaimudin Soulisha, keduanya meninggal karena tertembak di bagian kepala serta Wahid Suneth (16) disebabkan pendarahan akibat luka terkena tembakan pada pangkal paha kanan. Selain itu, lima warga dari kedua desa juga dilaporkan menderita luka-luka akibat terkena lemparan batu, sabetan benda tajam maupun tertembak senapan angin. Seorang personil Brimob dan Polda Maluku Bripda Marselino Hetharia juga mengalami luka di bagian kepala akibat terkena lemparan saat berupaya meleraikan bentrokan tersebut hingga harus menjalani perawatan intensif. Aksi penyerangan tersebut juga mengakibatkan sedikitnya 17 unit rumah di Dusun Nahai terbakar”.⁸

Informasi lain dari pemberitaan media massa yang relatif berbeda dalam hal data jumlah korban dimuat dalam situs berita nasional, Antara. Berita dengan judul “Lima orang meninggal dalam bentrokan warga Desa Seith vs Negeri Lima” dipublikasikan pada Jumat, 1 Agustus 2014 02:25 WIB peneliti kutip sebagai berikut.

“Warga Desa Seith dan warga Negeri Lima, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, Maluku Tengah kembali terlibat bentrok dan saling serang pada Kamis (31/7) petang, mengakibatkan lima orang meninggal dunia. Pantauan Antara Jumat dini hari, peristiwa bentrokan dan saling serang berlangsung di dusun Nahai yang merupakan perbatasan antarkedua desa bertetangga itu sekitar pukul 16.00 WIT. Aksi penyerangan ke dusun Nahai dilakukan warga Seith karena tidak terima atas pembacokan hingga meninggal seorang warganya yakni Benjamin Maju (30) di dusun tersebut. Benjamin Maju tewas karena mengalami pendarahan

akibat luka bacokan di bagian kepala dan punggung kiri. Korban sempat dilarikan ke RSUD Haulussy, Kudamati Ambon, tetapi nyawanya tidak tertolong akibat luka yang diderita tergolong parah. Kematian korban menyulut emosi warga Seith lainnya yang akhirnya melakukan penyerangan ke Dusun Nahai yang dihuni warga Negeri Lima. Aksi penyerangan tersebut mengakibatkan seorang warga Seith lainnya yakni Usman Moni (38) terluka akibat terkena sabetan parang pada bagian leher. Sedangkan tiga warga Negeri Lima yang meninggal yakni Duba Selli (60) dan Kaimudin Soulisha, keduanya meninggal karena tertembak di bagian kepala serta Wahid Suneth (16) disebabkan pendarahan akibat luka terkena tembakan pada pangkal paha kanan. Selain itu, lima warga dari kedua desa juga dilaporkan menderita luka-luka akibat terkena lemparan batu, sabetan benda tajam maupun tertembak senapan angin. Seorang personil Brimob dan Polda Maluku Bripda Marselino Hetharia juga mengalami luka di bagian kepala akibat terkena lemparan saat berupaya meleraikan bentrokan tersebut hingga harus menjalani perawatan intensif. Aksi penyerangan tersebut juga mengakibatkan sedikitnya 17 unit rumah di Dusun Nahai terbakar”.⁹

2. Konflik Negeri Mamala – Negeri Morela

Konflik merupakan realitas yang sudah puluhan tahun mewarnai hubungan negeri Mamala-Morela Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Konflik silih-berganti itu telah berlangsung lebih dari dua puluh lima tahun. Konflik antar warga Mamala dan Morela hingga kini belum diselesaikan sehingga membuat

⁸Sumber:

<http://www.antaraneews.com/berita/446506/lima-orang-meninggal-dalam-bentrokan-warga-desa-seith-vs-negeri-lima>. Diakses pada hari Jumat, 11 September 2015.

⁹Sumber:

<http://www.antaraneews.com/berita/446506/lima-orang-meninggal-dalam-bentrokan-warga-desa-seith-vs-negeri-lima>. Diakses pada Senin, 7 September 2015.

keresahan bagi masyarakat Morela. Betapa tidak, Negeri Morela yang berada di ujung Utara Kecamatan Leihitu yang hendak ke Ambon harus melewati jalur laut akibat jalur jalan diblokade oleh warga Mamala. Pemblokiran jalan utama menuju ke Kota Ambon tersebut melumpuhkan ekonomi warga setempat.

Konflik pertama antara kedua negeri bertetangga ini terjadi pada tahun 2005. Kronologi konflik tersebut dapat diketahui dari penjelasan informan, AKS, berikut ini.

“Konflik yang terjadi dari Tahun 2005 antara Mamala, Morela akar permasalahannya yaitu tentang persoalan sejarah, bahwa *sapa pung* sejarah yang paling betul dan juga tentang keberadaan (awal mula Mamala dan Morela) yaitu Mamala yang ada *kamuka* atau Morela yang *kamuka*, tapi bagi Bapak, Mamala, Morela ini awalnya satu saja, dan juga mengenai adat pukul sapu, Morela bilang *dong pung*, Mamala *jua* bilang *dong pung*”.¹⁰

Lebih lanjut, AKS, menjelaskan bahwa sampai saat ini, kedua negeri masih belum aman.

“Belum, karena dari *dolo sampe* sekarang *seng* pernah damai *batul-batul*, oleh karena itu Bapak (saya) *pung* harapan dari segi hukum harus lebih kuat, dan harus melibatkan kedua belah pihak (Mamala, Morela), sudah berbagai cara dilakukan *sampe su* datangkan orang-orang Akademis, Aparat, tapi tetap sama saja”.¹¹

Sesungguhnya konflik Negeri Mamala tidak hanya terjadi dengan Negeri Morela saja tetapi konflik yang terlama dan belum diselesaikan sampai saat ini adalah konflik dengan Negeri Morela. Penjelasan tentang ini disampaikan oleh informan penelitian, MM, sebagai berikut.

“Konflik yang terjadi di Negeri Mamala hanya pernah terjadi dengan dua Negeri tetangga yaitu Morela dan Hitu, konflik yang terjadi dengan Negeri Hitu ini tidak berlangsung lama, sedangkan dengan Negeri Morela sangat lama dari Tahun 2005 yang menjadi masalah/inti permasalahannya yaitu: Mempertahankan sejarah dan seluruh rangkaianannya yaitu adat dan lain-lain, belum jelasnya atau kejelasan tentang eksistensi antara Mamala dan Morela, yakni orang Mamala Berpendapat mereka yang ada duluan, sedangkan Morela juga mengatakan demikian bahwa mereka yang awal-awal. Begitu pula halnya tentang Adat “Pukul sapu” orang Mamala mengatakan Adat itu berasal dari Mamala, sebaliknya orang Morela pun demikian. Konflik ini terjadi hingga Tahun 2008 adanya kesepakatan damai antara dua belah pihak, kemudian konflik pecah lagi pada Tahun 2012 hingga sekarang dengan akar masalah, dengan persoalan yang sama”.¹²

Kronologis konflik antara Negeri Mamala dengan Negeri Morela dapat ditemukan lebih lengkap pada pemberitaan media-media massa lokal. Secara berurutan, peneliti mengutip beberapa pemberitaan terpilih sebagai berikut.

¹⁰ AKS, Kepala Soa Morela, *Wawancara* di Morela 23 Agustus 2015.

¹¹ *Ibid.*

¹² MM, tokoh masyarakat Negeri Mamala, *wawancara* di Mamala 20 Agustus 2015.

Konflik kedua terjadi pada tanggal 19 Juni 2008, sebagaimana diberitakan pada *Harian Pagi Siwalima* berikut ini.

“Bentrokan antara Negeri Mamala dan Negeri Morela Kecamatan Leihitu Malteng) kembali terjadi. Bentrokan yang terjadi pada Minggu (19/6) sekitar pukul 07.00 WIT itu, mengakibatkan seorang warga Morela, Mokadar Latukau mengalami luka tembak pada bagian tangan kanan hingga menembus rusuk kanannya, serta satu bangunan Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Mamala rusak”.¹³

Konflik ketiga terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan konflik kedua yakni tanggal 29 Juni 2008. Sebagai deskripsi yang lebih detail, kronologis konflik berikut dikutip dari pemberitaan koran *Siwalima*.

“Sekitar pukul 03.00 WIT terdengar bunyi bom dan tembakan senjata, entah dari arah mana, sehingga membuat para pemuda dari kedua negeri ini terbangun. Sekitar pukul 07.00 WIT, terdengar lagi tembakan dari arah gunung ke dalam negeri Mamala. Tembakan itu juga mengarah ke negeri Morela. “Tiba-tiba ada tembakan dari arah gunung ke dalam kampung Mamala, begitupun tembakan tersebut mengarah ke negeri Morela, sehingga di Morela mengira kita di Mamala yang serang, begitu kita di Mamala mengira orang Morela yang serang”, papar Umar, salah seorang pemuda Mamala. Tidak lama berselang, sebuah bom meledak di tanah kosong, yang adalah batas antara kedua negeri. Langsung terjadi konsentrasi massa pada kedua desa dan siap saling menyerang satu sama lain. Pada pagi itu terjadi aksi saling serang, dan memakan

korban, Mohkadar Latukau, warga Morela, yang tertembak pada tangan kanan dan tembus ke rusuk kanannya, serta SD Negeri 3 Mamala yang dirusakkan massa. Aparat kepolisian segera mendatangi lokasi pertikaian dan berhasil mencegah sehingga tidak terjadi bentrokan besar”.¹⁴

Konflik berikutnya terjadi pada tanggal 24 Juni 2013 sebagaimana dikutip dari *Kompasiana.com* berikut ini.

“Sejak hari Minggu, 23 Juni 2013 hingga Senin, 24 Juni 2013 Negeri Mamala dan Morela Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah (Malteng) terlibat bentrok, serangkaian ledakan bom rakitan dan aksi saling serang antarwarga pun tak terelakan hingga mengakibatkan satu orang tewas dan belasan orang lainnya mengalami luka-luka, serta 10 rumah warga juga hangus terbakar”.¹⁵

Konflik terakhir pada saat penelitian ini dilakukan terjadi pada tanggal 21 Juli 2015 sebagaimana diberitakan oleh koran *Ambon Ekspres* berikut ini.

“Informasi di tempat kejadian perkara, konflik berawal dari penganiayaan yang dilakukan oleh Jamal Sasole (45), terhadap Agil, warga desa Mamala, sekitar pukul 16.00 Wit, Jumat sore. Saat itu Agil tengah bersilaturrehmi di Desa Morela. Usai bersilaturrehmi, Agil kemudian dicegah oleh Jamal, di ujung kampung desa Morela. Agil langsung dianiaya oleh Jamal. “Waktu itu, Beta pergi silaturrehmi di mama pung keluarga, kebetulan mama dari Morela. Saat pulang, Jamal cegah. Ketika cegah itu, langsung di hantam dengan parang sebanyak dua kali, karena seng makan, kemudian dia mundur dan beta langsung kabur. Saya lapor polisi,” kata Agil, dengan menggunakan

¹³ *Harian Pagi Siwalima*, Senin, 30 Juni 2008. Dikutip dari Mudji Waluyo. *Implementasi Polisi Mitra Masyarakat dalam Merajut Damai di Bumi Mamala-Morela*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2009), h. 33.

¹⁴ (Kutipan dari *Harian Umum Siwalima*, 30 Juni 2008). Dikutip dari *ibid.* h. 35.

¹⁵Sumber: http://www.kompasiana.com/mreindy/mamala-morela-kembali-bergolak_55290cf86ea834191f8b4576. Diakses pada Senin, 7 September 2015.

dialek Ambon, kepada koran ini di Desa Mamala, kemarin. Sehari setelah penganiayaan terhadap Agil tersebut, kembali ada penembakan terhadap Arsyad Malawat (40), sekitar pukul 14.00 Wit, Minggu kemarin. Penembakan dilakukan di tengah hutan perbatasan kedua desa tersebut. Usai penembakan, konsentrasi massa di kedua desa bertetangga itu terjadi. Namun konsentrasi massa itu, akhirnya bisa dibubarkan oleh aparat keamanan dari Polsek, Koramil, BKO Brimob dan TNI diperbatasan kedua desa. Aparat kepolisian dari Polres Pulau Ambon dan PP Lease, yang berhasil mengungkap identitas terduga pelaku penganiayaan dan penembakan terhadap kedua warga asal Desa Mamala, sekira pukul 19.30 Wit, menuju Desa Morela untuk mengamankan terduga pelaku yakni Jamal Sasole. Tim yang dipimpin langsung oleh kapolres Pulau Ambon dan PP Lease, AKBP Komaruz Zaman itu, dihadang oleh warga desa Morela, terutama pihak keluarga dari terduga pelaku, dengan melakukan pemblokiran jalan di Desa Morela. Tim yang dipimpin kapolres itu tetap saja masuk. Jamal Sasole, akhirnya ditangkap. Usai penangkapan itu, tim yang hendak berbalik arah, dihadang dan dihadiahi satu buah bom, dengan daya ledak yang cukup kuat. Akibatnya Bripda Faisal Lestaluhu, Briptu Fitri Arodes dan AKBP Komaruz Zaman, terkena serpihan bom. Bripda Faisal Lestaluhu, tewas ketika hendak dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. “Sekitar 19.30 Wit, waktu kita masuk itu untuk menangkap terduga pelaku JS ini, kita langsung dihadang oleh warga. Mereka melempari kita dengan batu serta memblokir jalan. Namun kami tetap masuk, nah setelah mau balik sekitar pukul 20.00 Wit, ternyata jalan sudah diblokir. Saat itu Faisal dan Fitri dan pak kapolres hendak membuka blokir itu, tiba-tiba bom meledak, akibatnya ketiga orang ini terkena serpihan bom. Namun yang

cukup parah itu Faisal ini, akibatnya meninggal setelah dalam perjalanan menuju rumah sakit,” kata salah satu aparat keamanan kemarin”.¹⁶

Sampai pengumpulan data penelitian ini selesai dilakukan, kedua negeri masih tegang dan belum saling mengunjungi. Masyarakat Morela yang hendak bepergian keluar, misalnya ke Kota Provinsi Ambon dan ke Kota Kabupaten Masohi masih harus melalui jalan laut karena akses darat yang bisa dilewati hanya jalan yang melintasi Negeri Mamala.

Dari deskripsi kronologis kejadian itu, beberapa hal dalam pertikaian kedua negeri, Mamala-Morela dapat diuraikan bahwa tampak di situ faktor latent, batas tanah antara kedua negeri menjadi faktor utama penyebab konflik yang telah terjadi puluhan tahun itu. Dalam teori konflik, suatu faktor latent, sebagai faktor picu, bisa bertahan lama karena penyelesaian masalah tidak tuntas, atau tidak menyentuh level kebutuhan pihak-pihak yang bertikai. Dalam durasi tertentu, pertikaian bisa terhenti, tetapi kemudian hari bisa muncul lagi, dan melibatkan faktor picu baru. Walau demikian, faktor picu latent tetap membentuk struktur konflik, sehingga penyelesaian masalah pada titik picu baru, tanpa menyentuh titik picu latent, akan tetap membuat pertikaian itu bisa muncul lagi.

Umumnya pertikaian antar-negeri di Maluku terjadi karena faktor picu *latent* (masalah batas tanah) tidak terselesaikan dengan tuntas. Karena hal tersebut, ketegangan antar-pemuda (misalnya melalui pesta kampung/dansa-dansa) sekalipun bisa menyulut konflik massal antar-negeri. Dalam kondisi seperti itu, faktor kecurigaan (*prejudice*) antar-warga cukup kuat terbentuk. Misalnya dalam pertikaian Mamala-Morela 29 Juni 2008, siapa yang sengaja mengeluarkan tembakan, langsung menyulut reaksi warga kedua negeri. Yang satu menganggap tembakan itu dilakukan oleh warga negeri lainnya, dan sebaliknya. Dalam kondisi itu, pihak ketiga akan merancang berbagai hal semata-mata untuk memperparah relasi warga kedua negeri.¹⁷

Sebenarnya dimensi saling curiga ini yang menjadi faktor picu di atas faktor latent tadi. Sebab masyarakat kedua negeri mengakui masalahnya bukan pada 'batas tanah', tetapi ada faktor baru yang telah terbentuk sebagai akumulasi dari tidak terselesaikannya masalah tersebut dalam waktu yang sangat lama.

3. Konflik Negeri Wakasihu – Negeri Larike

Negeri Wakasihu dan Larike adalah negeri bertetangga yang secara administrasi berada dalam wilayah kecamatan Leihitu Barat setelah pemekaran Leihitu menjadi dua kecamatan. Konflik ini sempat memicu perhatian rakyat Maluku karena eskalasi konflik yang terjadi begitu mencekam dan bahkan ada

insiden mayat yang hendak dikuburkan di Negeri Larike batal karena tidak diberi izin untuk melintas di Negeri Wakasihu. Akibatnya, mayat dan rombongan pengantarnya dikembalikan ke Kota Ambon dan dikuburkan di sana.

Konflik yang tergolong besar dan menimbulkan dampak sampai saat ini adalah konflik yang terjadi pada tahun 2012 silam. Beberapa konflik yang terjadi sebelum dan sesudah tahun 2012 hanya berupa insiden-insiden kecil yang tidak berdampak massif.

Kronologis konflik Negeri Wakasihu dan Negeri Larike disampaikan oleh informan penelitian berikut ini.

“(Konflik) *Katong* (kami, Wakasihu) *deng* (dengan) Larike saja *mo* yang *se* (kamu) maksud (konflik) 2009 itu *cuman bakalai* (hanya berkelahi) antara anak muda saja tapi itu langsung diatasi dan *seng* (tidak) masalah. Yang masalah itu (konflik) 2012 itu. Awal kejadian konflik 2012, di mana pada saat itu bertepatan dengan lebaran idul fitri tahun 2012, dimana sudah menjadi kebiasaan kalau sudah selesai sholat idul fitri itu dimana anak-anak wakasihu *pigi* (pergi) *ronda-ronda* (jalan-jalan) di Larike maupun di kampung-kampung yang lain. Pada awal konflik pada tahun 2012 terjadi itu, dimana pada saat itu sudah selesai sholat idul fitri, dan anak-anak Wakasihu pun pergi ronda-ronda di Larike maupun kampung yang lain untuk ketemu teman-teman alumni maupun keluarga *dong* (mereka). Tiba-tiba *seng* lama *lai* (lagi) masyarakat Wakasihu mendengar sudah terjadinya konflik dan pada saat itu semua masyarakat Wakasihu *seng* tau akan terjadinya konflik tersebut, dan pada saat itu sudah terjadinya korban luka dari pihak Wakasihu yang bernama Abang Aci

¹⁷ Mudji Waluyo, *Implementasi Polisi...*h. 37.

Sanduan. Tetapi bukan itu saja dimana anak-anak yang *pigi ronda* itu semua yang berjumlah kurang lebih 18 orang itu ditahan dan mereka *ditaruh* (ditahan) di bale (balai) desa Larike. Pada saat itu semua masyarakat Wakasihu panik dan bingung mau bikin bagaimana karena *katong seng* bisa berbuat apa-apa karena anak-anak Wakasihu masih ditahan”.¹⁸

Kutipan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa bagi informan, dan begitu pula anggapan seluruh masyarakat Wakasihu, bahwa konflik dipicu oleh masyarakat Larike yang menyandera pemuda-pemuda Wakasihu saat mereka melintas di Negeri Larike pada hari raya Idul Fitri. Penyanderaan tersebut tidak diterima dengan baik oleh masyarakat Wakasihu sehingga memicu konflik yang akhirnya menelan korban jiwa.

Terdapat persamaan persepsi antara informan dari kedua negeri yang bertikai ini bahwa konflik besar terjadi pada tahun 2012 silam. Tentang konflik diuraikan oleh seorang informan penelitian dari Wakasihu, berikut ini.

“Masalah itu *katong pung* saudara-saudara yang dari negeri Wakasihu itu *dong* datang *ka* Negeri Larike *dong pung* tujuan mau *ka* Batu Layar (tempat wisata di wilayah perbatasan Wakasihu dan Larike) , pas bertepatan anak-anak pemuda Larike *dong* ada *biking* acara silat di Negeri Larike yang diadakan di muka masjid Nurul Ikhlas pada lebaran Idul Fitri tanggal 19 Agustus 2012, lalu *katong pung ade-ade* dari Wakasihu ini *dong* senggol *katong pung ade-ade* di sini *deng* motor, *la* di situ *akang* jadi persoalan mulai muncul dari situ tapi setelah itu abis *dong su* kembali *ka* Wakasihu lalu pada

akhirnya *dong* dari Wakasihu *dong seng tarima deng dong sodara-sodara* dapat pukul gara-gara dapat pukul tadi dari pemuda-pemuda Larike *la* dari negeri Wakasihu *dong* lakukan penyerangan maka dari Larike harus lakukan perlawanan *par* masyarakat Negeri Wakasihu sehingga terjadinya hal demikian”.¹⁹

Berbeda dengan penjelasan informan dari Wakasihu, informan dan seluruh masyarakat Larike (berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan sampai jenuh dan menghasilkan jawaban yang sama) meyakini bahwa orang Larikelah yang justru membela diri dan menyerang sebagai bentuk serangan balasan untuk mempertahankan kehormatan mereka.

Dampak dari konflik tersebut sangat merugikan masyarakat, terutama masyarakat Negeri Larike yang harus menempuh jalan memutar apabila hendak ke Kota Ambon. Uraian tentang dampak konflik digambarkan oleh informan penelitian berikut ini.

“Masalah jarak biasanya kalau *katong* mau *ka* ambon lewat Wakasihu dengan jarak tempuh satu jam setengah tapi *deng* masalah ini lalu *katong* lewat Hitu *deng* jarak tempuh 2 jam lebih. Rasa malu hati antar kedua negeri akibat dari konflik untuk saling masuk keluar negeri karena ada orang-orang tertentu yang sengaja memanfaatkan hal ini. Adanya korban jiwa dari negeri Wakasihu yaitu satu orang dan luka-luka antar kedua negeri akibat lemparan batu” (MAK, 47 tahun, Sekretaris Negeri Larike, Larike 21 Juli 2015).

¹⁸ HP, Tokoh Adat Negeri Wakasihu, *Wawancara* di Wakasihu 19 Juli 2015.

¹⁹ MAK, 47 tahun, Sekretaris Negeri Larike, *Wawancara* di Larike 21 Juli 2015.

Tampaknya konflik yang terjadi antara kedua negeri yang berdampak sampai saat ini pada hubungan antar warga kedua negeri dan masalah lain seperti larangan saling melintas, disadari oleh masyarakat kedua negeri. Meskipun begitu, konflik masih terus berjalan dan bahkan harus dicegah dengan penempatan BKO TNI di perbatasan kedua negeri.

D. Mengurai Akar Penyebab Konflik

Ada berbagai hal yang bisa menjadi pemicu konflik. Ketidakcocokan antar pribadi, perbedaan sistem nilai, persaingan, ketidakjelasan batas-batas wewenang dan tanggung jawab, perbedaan fungsi, miss communication, dan pertentangan kepentingan adalah contoh kondisi dan situasi tertentu dalam masyarakat yang menjadi penyebab munculnya konflik. Sebagaimana di negara-negara lainnya, di Indonesia terdapat konflik horizontal dan konflik vertikal. Namun konflik horizontal lebih sering dijumpai di Indonesia sebagai konsekuensi atas keragaman yang dimilikinya.

Terjadinya konflik dan perilaku kekerasan dalam masyarakat tergantung dari sumber potensi konflik yang ada. Menurut Koentjoraningrat, setidaknya ada 4 sumber konflik dalam masyarakat majemuk. Keempatnya adalah persaingan antara kelompok etnik dalam memperoleh sumber kehidupan, adanya kelompok etnik yang memaksakan kebudayaan kepada kelompok etnik lainnya, adanya golongan agama yang memaksakan

ajarannya kepada golongan agama lain, dan adanya potensi konflik yang sudah mengakar dalam masyarakat.

Meski demikian masih ada faktor lain yang bisa memicu munculnya konflik yakni ketidakadilan ekonomi, ketidakstabilan polititik, serta ketimpangan sosial. Untuk menyelesaikan konflik di Jazirah Leihitu, maka perlu pemahaman yang baik mengenai apa penyebab konflik tersebut. Hal tersebut bisa diketahui dengan memahami kondisi masyarakat setempat.

Jikalau menanyakan ke masyarakat di negeri-negeri yang berkonflik secara sambil lalu maka dapat diketahui bahwa umumnya konflik terjadi karena masalah sepele terutama oleh perkelahian pribadi antara remaja/pemuda yang berasal dari dua kampung yang berbeda. Begitu pula jikalau membaca pemberitaan-pemberitaan media massa tentang konflik yang terjadi. Sebagai contoh, dalam sebuah pemberitaan, Bupati Maluku Tengah dengan tegas menyebutkan bahwa bentrok warga Seith-Negeri Lima dipicu minuman keras (miras).

“Bentrokan antar warga Negeri (Desa) Seith dengan Negeri Lima, Kecamatan Salahutu, pulau Ambon, Maluku Tengah (Malteng) pada Kamis (31/7) sore, yang menimbulkan korban jiwa dan harta benda dipicu minuman keras (miras). "Masalah pokok terjadinya bentrokan antar warga di dua negeri tersebut akibat mengkonsumsi miras," kata Bupati Maluku Tengah, Abua Tuasikal, di Ambon, Jumat (1/8). Menurut Abua, seperti dilansir Antara, bentrokan antar warga yang sering terjadi daerahnya, berawal dari konsumsi miras yang

berlebihan sehingga ada warga masyarakat yang mabuk dan melakukan tindak kekerasan akibatnya menimbulkan korban. Selanjutnya warga masyarakat yang merasa tidak menerima atas perbuatan melanggar hukum itu menjadi marah dan terjadilah bentrokan antar negeri”.²⁰

Tetapi jika dianalisa lebih mendalam, faktor penyebab konflik ternyata tidak sesederhana itu. Banyak faktor yang berkontribusi pada terjadinya konflik sementara tampaknya persoalan kenakalan remaja dan pengaruh minuman keras hanya merupakan faktor pemicu belaka.

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan terlebih dahulu hasil-hasil wawancara dengan informan penelitian tentang faktor-faktor yang menyebabkan konflik. Setiap lokasi dipilih berdasarkan karakteristik penyebab konfliknya berdasarkan informasi dari informan penelitian. Pembahasan pada bagian ini disusun berdasarkan faktor-faktor penyebab dan akar konflik berdasarkan informasi dari informan penelitian.

1. Kenakalan remaja dan pengaruh minuman keras

Kebanyakan informan menyebutkan bahwa penyebab dari konflik adalah kenakalan remaja ditambah pengaruh minuman keras. Kebiasaan meminum minuman keras memang marak dilakukan oleh remaja di Jazirah Leihitu,

khususnya dalam merayakan hari raya Idul Fitri. Itulah mengapa, hampir semua konflik yang terjadi berawal dari perkelahian remaja dan pada saat hari raya idul fitri. Itu terjadi pada konflik antara Wakasihu – Larike, Negeri Lima – Ureng, dan Negeri Lima – Seith. Kasus yang mungkin agak berbeda antara Mamala dan Morela. Berikut kutipan hasil-hasil wawancara terkait dengan argumentasi ini.

“Jadi kebanyakan yang terjadi ini hal yang kita tidak tahu sebenarnya persoalan mabuk ditambah dengan pemerintah belum mampu untuk mengambil langkah-langkah tertentu...”.²¹

“Itu kan kenakalan remaja akhirnya terjadinya bentrok antara kedua negeri dan pada waktu itu bertetapan *deng* hari raya dan anak-anak Wakasihu *pigi ronda-ronda par kumpul alumni* dan *liat* keluarga juga”.²²

2. Penyelesaian yang tidak komprehensif dan tuntas

Pada umumnya konflik besar yang menelan korban hanya terjadi sekali tetapi konflik dalam arti “perang dingin” terjadi sepanjang masa. Pihak TNI dan POLRI bahkan harus menempatkan satuan khusus untuk mencegah konflik terbuka terulang kembali. Itu terjadi pada semua negeri yang pernah bertikai. Penempatan satuan pengamanan tersebut mengindikasikan bahwa sesungguhnya konflik tidak pernah betul-betul selesai. Setiap saat

²⁰Sumber:
<http://www.antaraneews.com/berita/446506/lima-orang-meninggal-dalam-bentrokan-warga-desa-seith-vs-negeri-lima>.
Diakses pada Senin, 7 September 2015.

²¹ YH, 49 Tahun, tokoh Adat Negeri Lima, wawancara di Negeri Lima, 20 Agustus 2015.

²² JH, Tokoh Adat Wakasihu, wawancara di Wakasihu 20 Juli 2015.

konflik terbuka dapat terjadi kembali meskipun hanya dipicu oleh masalah sepele.

Argumentasi bahwa akar masalah selain kenakalan remaja dan minuman keras ialah penyelesaian konflik yang tidak komprehensif dan tuntas dapat dilihat pada konflik yang terus berulang antara Mamala-Morela, Negeri Lima – Seith dan Wakasihu – Larike. Argumentasi lainnya adalah situasi hubungan antar negeri yang berkonflik selalu diwarnai dengan ketegangan dan belum ada interaksi yang harmonis sebagaimana layaknya dua desa yang bertetangga.

Terkait dengan argumentasi tersebut, peneliti mengemukakan beberapa hasil wawancara sebagai berikut.

“(Penyebab) konflik ini bisa dikatakan dari pihak pemerintah (desa) karena pada saat itu masih pakai pejabat. Jadi pada saat itu tidak ada hukum adat maupun pendekatan agama Jadi kebanyakan yang terjadi ini hal yang kita tidak tahu sebenarnya persoalan mabuk ditambah dengan pemerintah belum mampu untuk mengambil langkah-langkah tertentu, untuk mendamaikan sebelum itu (konflik) terjadi. Mudah-mudahan dengan adanya raja sekarang ini, masyarakat bisa menyadari, bisa meredam dan secara perlahan-lahan bisa diselesaikan”.²³

Jawaban informan di atas menunjukkan bahwa konflik terjadi karena pemerintah (dalam hal ini pemerintah negeri) diyakini belum melakukan upaya serius dan komprehensif sehingga penyelesaian konflik tidak tuntas.

²³ YH, 49 Tahun, tokoh Adat Negeri Lima, wawancara di Negeri Lima, 20 Agustus 2015.

Penyebabnya adalah karena Negeri Lima waktu itu belum memiliki kepala pemerintahan yang definitif. Hal serupa juga terjadi di Seith di mana kepala pemerintahannya masih dijabat oleh seorang pejabat.

“Sama sekali tidak, karena masyarakat Negeri Lima ngotot dengan korban harus dikembalikan dan pada akhirnya tidak dikembalikan maka konflik sampai sekarang belum terselesaikan juga. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai kesadaran, ada kesadaran itu. Atau yang paling penting kita bisa lihat bahwa kejadian yang terjadi. Masyarakat Negeri Lima mempunyai hasrat, akan tetapi kita lihat bahwa pemuda Negeri Lima sering membuat kelompok-kelompok kecil. Dan sebenarnya masyarakat Negeri Lima ingin perdamaian itu terselesaikan dan disinilah nilai adat berperan penting dan kita lihat bahwa Negeri-negeri di Jesirah ini mempunyai hubungan kekeluargaan sangat kuat. Tetapi yang menjadi yang pertama, kelompok-kelompok pemuda yang tidak terdidik lalu kemudian pemerintah tidak terlalu konsen dan peduli terhadap hal-hal tersebut. Jadi ketika terjadi tidak ada upaya pencegahan”.²⁴

Penyelesaian yang tuntas juga dipahami oleh beberapa informan sebagai penyelesaian secara hukum. Hal itu dapat dilihat pada kutipan wawancara berikut ini.

“*Balom* (belum) ada penyelesaian sampai sekarang tapi pada waktu itu ada pihak-pihak yang mencari solusi untuk damai itu seperti saniri negeri, pemerintah negeri, tokoh-tokoh masyarakat, dan bahkan pihak keluarga korban. Dan sampai *sakarang seng* dapat solusinya..... *Balom* berakhir, karena pelaku *balom* tertangkap

²⁴ IS, tokoh adat Negeri Lima, wawancara di Negeri Lima, 20 Juli 2015.

dan pada waktu itu juga pemerintah negeri beserta staf-stafnya, saniri negeri. Tokoh-tokoh masyarakat, dan pihak keluarga korban itu mencari solusi untuk menyelesaikan tapi sampai sakarang *balom* dapat *akang* hasil jadi *balom* ada penyelesaian sampai *sakarang*. (Penyelesaian konflik) *balom* sesuai *deng katong samua pung* harapan karena pelaku *balom* tertangkap karena *katong* butuh keadilan. Begitupun juga pihak keluarga dan *katong* ini juga merupakan negara hukum” (TN, Kepala Adat Wakasihu, Wawancara di Wakasihu 20 Juli 2015).

Hal yang sama disampaikan oleh tokoh adat Negeri Lima berikut ini.

“Sampai saat ini *balom* terselesai seutuhnya tetapi dimana para perintah negeri beserta staf-stafnya, tokoh-tokoh masyarakat bahkan pihak keluarga korban sudah mencari solusi antara dua negeri tersebut sampai bahkan di bawah kepolisian maupun polda dan pada saat itu dimana perintah negeri membuat tuntutan kalau bisa pelaku sebagai jaminan. Di mana pemerintah mau damai yang penting pelaku sudah di tangkap, bahkan tuntutan yang paling besar itu pihak keluarga korban yang penting ada titik temu dan pelakunya di tangkap maka bisa akan terjadinya perdamaian jadi sampai sekarang belum ada perdamaian karena belum ada titik temu dan pelaku belum tertangkap sampai sekarang (HP, Tokoh Adat Negeri Wakasihu, Wawancara di Wakasihu 19 Juli 2015).

Tokoh adat Negeri Lima percaya bahwa ada nilai-nilai adat/lokal bersama yang bisa dijadikan sebagai solusi konflik tetapi penyelesaian secara hukum harus tuntas terlebih dahulu.

“Itu pasti ada, karena pada waktu itu tokoh-tokoh adat juga terlibat dan katong juga bisa melakukan pertemuan antara kedua negeri untuk melakukan musyawara baru diajukan kepada pemerintah untuk melakukan keputusan antara kedua kampung tersebut dan tokoh-tokoh adat bekerja sama dengan pemerintah karena kalau konflik dengan negeri luar itu tokoh adat di bawah perintah dan yang penting pelaku tertangkap dulu karena sampai sekarang. Pelaku belum tertangkap dan katong lakukan itu karena katong ini merupakan negara hukum dan katong butuh keadilan. dan misalnya konflik itu akan terjadi kedua kali lagi maka adat akan berlaku”.²⁵

Tokoh adat Wakasihu lainnya, JH, menyebutkan hal yang sama sebagai berikut.

“Balom ada perdamaian sampai sekarang, artinya wakasihu siap untuk melakukan perdamaian yang penting pelaku tertangkap itu saja dan pada saat itu polda turun itu untuk tenangkan katong saja karena pada waktu itu lebaran dan waktu itu jua pemerintah negeri beserta staf-stafnya, tokoh-tokoh masyarakat, dan pihak keluarga korban itu mencari solusi untuk menyelesaikan tapi sampai sakarang *balom* dapat *akang* hasil jadi *balom* ada penyelesaian” (JH, Tokoh Adat Wakasihu, wawancara di Wakasihu 20 Juli 2015).

3. Masalah Sejarah dan Adat

Masalah sejarah dan adat ini secara khusus ditemukan pada konflik antara Mamala dan Morela. Informan penelitian yang merupakan kepala Soa di Mamala AKS, menjelaskan tentang pemicu konflik antara

²⁵ HP, Tokoh Adat Negeri Wakasihu, Wawancara di Wakasihu 19 Juli 2015.

Negeri Mamala dan Negeri Morela, sebagai berikut.

“Terdapat beberapa masalah yang selalu menjadi titik picu konflik, antara lain sebagai berikut. *Pertama*, masalah kesenjangan/kecemburuan status sosial yang berkembang di tengah masyarakat (saling mengejek terhadap profesi/pekerjaan dan segi kehidupan dalam mata pencaharian). *Kedua*, masalah adat, tradisi adat 'baku pukul manyapu' (pukul sapu lidi) setiap hari ke-7 Idul Fitri yang dilaksanakan setiap tahun. Masing-masing negeri mempertahankan acara adat tersebut sebagai implementasi adat yang sangat sakral sejak leluhur pada kedua negeri. *Ketiga*, masalah pesta muda-mudi yang dipengaruhi oleh minuman keras, berakibat terjadi benturan fisik yang mengarah kepada perkelahian antar pemuda kedua negeri dengan menggunakan sajam, senpi rakitan dan bom rakitan. *Keempat*, penyelesaian berbagai permasalahan yang ditangani Polsek Leihiitu lebih mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan (damai), penegakan hukum kurang tegas sehingga kurang memberikan efek jera. *Kelima* batas wilayah kedua negeri sering disengketakan. Batas yang dimaksud ah kosong dan lahan kuburan umum yang banyak tumbuh pohon Sukun dan pohon pisang. Dari kelima faktor itu, titik picu konflik yang berlangsung selama puluhan tahun itu berkisar pada masalah-masalah ekonomi, pergaulan sosial, dan masalah tanah, sebagai masalah feodal yang sering memicu konflik antar-negeri di Maluku” (AKS, Kepala Soa Morela, Wawancara di Morela 23 Agustus 2015).

Sementara akar penyebab konflik menurut informan penelitian ini adalah persoalan sejarah adat, sebagaimana keterangan berikut ini.

“Konflik yang terjadi dari tahun 2005 antara Mamala dan Morela akar permasalahannya yaitu tentang persoalan sejarah, bahwa *sapa pung* sejarah yang paling betul dan juga tentang keberadaan (awal mula Mamala dan Morela) yaitu Mamala yang ada *kamuka* atau Morela yang *kamuka*, tapi bagi Bapak (informan) Mamala dan Morela ini awalnya satu saja, dan juga mengenai adat pukul sapu, Morela bilang *dong pung*, Mamala *jua* bilang *dong pung*”.²⁶

Pendapat AKS, relevan dengan pendapat dari tokoh masyarakat Mamala lainnya, MM. MM sehari-harinya adalah dosen di IAIN Ambon.

“Yang menjadi masalah/inti permasalahannya yaitu mempertahankan sejarah dan seluruh rangkaianannya. Kedua, belum jelasnya atau kejelasan tentang eksistensi antara Mamala dan Morela, yakni orang Mamala Berpendapat mereka yang ada duluan, sedangkan Morela juga mengatakan demikian bahwa mereka yang awal-awal. Begitu pula halnya tentang Adat “Pukul sapu” orang Mamala mengatakan Adat itu berasal dari Mamala, sebaliknya orang Morela pun demikian. Konflik ini terjadi hingga Tahun 2008 adanya kesepakatan damai antara dua belah pihak, kemudian konflik pecah lagi pada Tahun 2012 hingga sekarang (dengan akar masalah, dengan persoalan yang sama. Adapula pemicu konflik yang lain yaitu kenakalan remaja, minuman keras, dan lain-lain”.²⁷

4. Penyelesaian Hukum Belum Menyentuh Basis Nilai

Konflik mungkin mengalami eskalasi ketika sebuah kelompok melihat musuhnya suka

²⁶ AKS, Kepala Soa Morela, Wawancara di Morela 23 Agustus 2015.

²⁷ MM, tokoh masyarakat Negeri Mamala, wawancara di Mamala 20 Agustus 2015.

bertengkar di luar norma yang berlaku.²⁸ Padahal dalam setiap kasus pertikaian, penyelesaian hukum diharapkan bisa menuntaskan masalah. Sebagai Negara Hukum, penegakan supremasi hukum menempatkan hukum sebagai panglima dalam penyelesaian setiap persoalan. Dalam kasus Mamala-Morela, intervensi penegakan hukum dilakukan secara intensif oleh pihak Polda Maluku. Namun setiap bentuk penyelesaian hukum dilakukan, tidak menimbulkan efek jera di kalangan masyarakat.²⁹

Ketika diteliti lebih mendalam, terjadinya pertikaian susulan karena bentuk penyelesaian hukum itu belum menyentuh basis nilai-nilai di dalam masyarakat. Penyelesaian hukum, sebagai langkah teraphi hukum *an-sich*, dalam pertikaian dengan tipikal tertentu di masyarakat, akan kurang efektif untuk menyelesaikan masalah. Walau memakan korban, hal itu tidak menimbulkan trauma, sebaliknya menyulut dendam. Faktor-faktor psikologis seperti ini pula yang tidak tertangani. Selain itu, pertikaian itu terkait juga dengan hegemoni kedua negeri satu sama lain. Dalam relasi antar-negeri di Maluku, umumnya satu negeri merasa lebih dominan dari negeri lainnya. Hal ini ternyata turut dibentuk juga oleh narasi sejarah sosial masyarakat, atau juga

mitos-mitos yang mereka yakini. Di Maluku, mitos terbentuknya suatu negeri membentuk struktur dominasi satu negeri terhadap lainnya. Penyelesaian hukum diharapkan memerhatikan hal-hal seperti itu pula.

E. Penutup

Mencermati berbagai konflik internal umat Islam di jazirah Leihitu, dapat disimpulkan bahwa kekerasan komunal merupakan sesuatu yang menggejala di masyarakat negeri raja-raja ini. Padahal tidak sedikit upaya damai yang telah dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait lainnya. Terulangnya berbagai konflik mengindikasikan rasa nasionalisme yang semakin terkikis. Primodialisme bukanlah sesuatu yang negatif, namun hal itu harus digunakan sebagai upaya untuk mempertahankan nilai-nilai luhur budaya, bukan sebagai spirit untuk saling menyerang sesama kelompok dengan cara-cara kekerasan dan saling membunuh.

Dengan demikian, penanganan konflik di Maluku seharusnya tidak hanya dilakukan melalui pendekatan terintegrasi pada aktor-aktornya saja (*integrity actor approach*), namun pola pendekatanyapun juga harus terintegrasi (*integrity model approachl*). Artinya pendekatan bukan hanya dari aspek keamanan saja, namun juga dari aspek sosial, budaya, ekonomi dan agama. Secara linier, tolok ukur keberhasilannyapun harus dilakukan melalui

²⁸ Janie Leatherman, *et.al.*. *Memutus Siklus Kekerasan: Pencegahan Konflik dalam Krisis Intranegara*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), h. 105.

²⁹ Lihat misalnya usaha merajut damai yang dipelopori oleh Kepolisian Daerah Maluku dalam Mudji Waluyo, *Implementasi Polisi....*, bagian 3, 4 dan 5.

suatu pengawasan berimbang (*check and balances*) yakni antara masyarakat di satu pihak, terhadap pemerintah dilain pihak, begitu pula sebaliknya. Sehingga pencapaian hasilnya pun dapat dilihat secara terukur. Selanjutnya keberhasilan dari pola penanganan konflik tersebut diatas, diharapkan dapat dijadikan sebagai cetak biru (*blue print*) dalam upaya penanganan kasus-kasus serupa di daerah lain di Indonesia.

Dari sisi lain konflik yang terjadi, ada pesan terselip di balik peristiwa ini. Rakyat butuh diperhatikan secara lebih serius oleh negara (baca: pemerintah). Para elit birokrasi kita harapkan tidak bisa terjebak pada urusan melanggengkan kekuasaan dengan memprioritaskan kerja-kerja politik saja. Akan tetapi harus lebih meluangkan waktunya menjalankan fungsi sebagai pelayan masyarakat. Rakyat butuh diayomi oleh para pejabat pemerintah. Rakyat butuh didengar keluh kesahnya oleh pemerintah. Dengan demikian mereka tidak melampiaskan frustrasi sosial yang dirasakan lewat serangkaian konflik sesama anggota masyarakat. Dan yang tidak kalah penting adalah pemerintah harus memiliki strategi khusus dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi.

Daftar Pustaka

Baron, Patrick, *et. al.* 2012. *Seusai Perang Komunal: Memahami Kekerasan Pasca-Konflik di Indonesia Timur dan Upaya*

Penanganannya, Yogyakarta: Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada.

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial* Jakarta : Kencana Prenama Media Group.

Burton, J. 1990. *Conflict: Resolution and Provention*. New York: St. Martina Press.

Cooley, Frank L. 1987. *Mimbar dan Takhta*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Coser, L., 2000. "Conflicts: Social Aspects" dalam D.L. Sills (eds). *The International Encyclopedia of Social Science*. New York: The Macmillan Company and the Free Press.

Dahrendorf, Ralf. 1959. *Class and Class Conflict*. Stanford: Stanford University Press.

Dharmawan, Arya Hadi. 2007. "Konflik Sosial dan Resolusi Konflik: Analisis Sosial Budaya," makalah dipresentasikan dalam seminar dan Lokakarya Nasional Pengembangan Perkebunan Wilayah Perbatasan Kalimantan, dengan tema "Pembangunan Sabuk Perkebunan Wilayah Perbatasan Guna Pengembangan Ekonomi Wilayah dan Pertahanan Nasional," Pontianak, Minggu, 10-11 Januari 2007.

Haba, John. 2008. "Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan

- Barat, Maluku dan Poso,” dalam Irwan Abdullah, dkk., *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, John W. 2003. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Thousand Oaks, CA: Sage.
- Kartodirdjo, S. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2013. *Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) Laporan Bulanan Januari 2013*, Edisi 2 Januari, 2013.
- Klinken, Gerry van. 2015. *Communal Conflict and Decentralisation in Indonesia*, paper dipublikasikan secara online oleh The Australian Centre for Peace and Conflict Studies /ACPACS, University of Queensland, Juli 2007, dan diakses melalui <https://www.google.com/#q=Communal+Conflict+and+Decentralisation+in+Indonesia> tanggal 19 September 2015 jam 19.00 WIB
- Kriesberg, L. 1998. *Constructive Conflicts from Escalation to Resolution*. New York: Boulder. Rowman and Liffeld Publisher. Inc.
- Leatherman, Janie, et.al.. 2004. *Memutus Siklus Kekerasan: Pencegahan Konflik dalam Krisis Intranegara*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [Lederach](#), John Paul. 1998. *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. United States Institute of Peace Press
- Lokollo, J.E.. 2008. "Modifikasi Kebijakan Kriminal Polda Maluku Berdasarkan Cara Hidup Orang Maluku", makalah (tidak diterbitkan), Ambon.
- Malik, Ichsan. 2003. *BAKUBAE, Gerakan dari Akar Rumput untuk Penghentian Kekerasan di Maluku*, Jakarta: LSPP.
- Mulyana, Deddy. 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Panggabean, S. Rizal. 2009. *Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)*, Jakarta: Asia Foundation, 2009.
- Putuhena, Saleh. 1980. "Sejarah Agama Islam di Ternate", dalam E.K.M. Masinambouw, eds., *Halmahera dan Raja Ampat*, Jakarta: PT. Bhratara.
- Rozi Syafua, dkk. 2006. *Kekerasan komunal: Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sahalessy, J. Latupati Sebagai Lembaga Hukum Adat Dalam Penyelesaian Konflik Antar Negeri di Kecamatan Leihitu Propinsi Maluku. *Jurnal Sasi Vol. 17 No.3 Bulan Juli-September 2011*.

- Tadjoeddin, M. Zulfan. 2002. *Anatomi Kekerasan Sosial dalam Konteks Transisi: Kasus Indonesia, 1990-2001*. Working Paper: 02/01- I UNSFIR. Jakarta: United Nations Support Facility for Indonesian Recovery.
- Waluyo, Mudji. 2009. *Implementasi Polisi Mitra Masyarakat dalam Merajut Damai di Bumi Mamala-Morela*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Watloly, A., Wakanno, A, Tawainella, N., Sallatolohy, F., Ufi, J.A. 2012. *Menggali Sejarah dan Kearifan Lokal Maluku*, Jakarta: Cahaya Pineleng.